

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas informasi berupa data maupun wawancara dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Belanja Modal Akun Covid-19 Di B2P2TOOT Karanganyar Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Rincian DIPA Satker B2P2TOOT Karanganyar telah melakukan revisi DIPA sebanyak delapan kali untuk merealokasi anggaran non Covid-19 ke Covid-19. Pada belanja modal akun khusus Covid-19 di B2P2TOOT Karanganyar khususnya konstruksi Gedung BSL-2 pagu tidak mengalami perubahan. Sedangkan, pada akun belanja selain akun Penanganan Pandemi Covid-19 mengalami pergeseran untuk efisiensi anggaran. Pagu awal sebesar Rp. 56.508.811.000 dan pagu akhir sebesar Rp. 52.494.818.000 (nilai pagu berkurang 7,1%), realisasi per 31 Desember 2021 Rp. 48.927.953.993 (93,21%) Alokasi awal Rp56.508.811.000 menjadi Rp52.494.818.000. Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19 di B2P2TOOT Karanganyar telah terealisasi dengan optimal dengan rata-rata persentase realisasi belanja sebesar 99,758%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

terhadap pagu anggaran yang telah dialokasikan. Dari pagu anggaran sebesar Rp7.755.000.000, realisasi belanjanya sebesar Rp7.736.194.700 sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp18.805.300 berasal dari perjalanan dinas Pokja yang semula diadakan *offline* tetapi terealisasi *online*. Keberhasilan belanja modal ini didukung SDM yang *capable* dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing. Belanja modal akun Covid-19 pada B2P2TOOT Karanganyar menggunakan mekanisme mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan berdasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Sama halnya dengan pelaksanaan belanja modal pada umumnya, tetapi yang menjadi berbeda pada proses bisnis yang telah menggunakan aplikasi SAKTI sehingga pengelolaan anggaran sangat terbantu khususnya dalam pengajuan SPM karena menurut pemangku kepentingan dianggap lebih efisien waktu, tenaga dan biaya yang tentunya meringankan beban pegawai.

2. Walaupun mengesampingkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan belanja modal akun khusus Covid-19 berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku walaupun sempat mengalami kendala pada proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang sebagian besar oleh faktor eksternal antara lain

kerancuan dalam menerjemahkan peraturan, berbenturan peraturan satu dengan peraturan lain yang tentu membingungkan pemangku kepentingan. Adanya blokir anggaran sehingga menunda pelaksanaan belanja modal. Kendala lainya yakni pada proses revisi hingga anggaran tidak terserap yang berpengaruh pada IKPA. Namun, kendala yang ditemui dapat diatasi alhasil pelaksanaan Belanja Modal Akun Covid-19 Di B2P2TOOT Karanganyar dinilai sangat baik dari aspek anggaran maupun implementasi.